



## Sinergi Pemerintah-Elit Lokal dalam Membangun Damai di Bondowoso

Amin Said Husni

UIN Sunan Ampel Surabaya

*duniafawaz03@gmail.com*

**Abstrak:** Penelitian ini fokus mengkaji kolaborasi pemerintah daerah Bondowoso dengan para elit lokal sebagai pemimpin informal dalam mewujudkan harmoni keagamaan di Bondowoso pada rentang waktu 2008 hingga saat ini. Terutama dalam konteks relasi antar umat beragama (*inter-religious relations*) maupun di internal umat beragama (*intra-religious relations*). Pada rentang waktu tersebut, potensi ketegangan dalam relasi beragama umat beragama di Bondowoso cukup terbuka. Terutama menyangkut isu Sunni dan Syi'ah. Namun, potensi tersebut berhasil dicegah berubah menjadi konflik kekerasan sehingga yang tercipta adalah situasi harmonis dan damai. Sinergi kedua entitas struktur pemerintah dan aktor lokal dalam merawat harmoni beragama menarik bila ditelusuri dari dua fokus utama. Pertama, berkaitan dengan bagaimana potret harmoni keagamaan yang berlangsung di Bondowoso sejak tahun 2008 ; kedua, bagaimana strategi pemerintah Bondowoso membangun perdamaian dalam perspektif pembangunan perdamaian campuran pada rentang waktu tersebut. Berpijak pada dua fokus tersebut, penelitian ini bertujuan memahami potret relasi harmoni keagamaan di Bondowoso sejak tahun 2008, serta strategi yang dijalankan pemerintah Bondowoso dalam membangun perdamaian dalam perspektif pembangunan perdamaian campuran. Untuk menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan perspektif perdamaian campuran (*hybrid peace*) sebagai lensa analisis. Perdamaian campuran merupakan tren dalam analisis pembangunan perdamaian yang berorientasi pada titik temu nilai global seperti demokrasi dan segala institusinya termasuk pemerintah daerah dengan aktor-aktor lokal seperti para tokoh agama sebagai salah satu elit lokal yang menentukan dalam mewujudkan harmoni keagamaan. Untuk menghasilkan satu temuan yang dalam dengan deskripsi yang kaya (*thick description*), penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif.

**Kata Kunci:** Harmoni – Perdamaian – Konflik – Lokal - Pemerintah

## Pendahuluan

Pada tahun 2006 silam, Bondowoso sempat menjadi sorotan nasional bahkan global. Sebab pada tahun itu, Bondowoso yang sejak lama senyap dalam ketenangan, diusik dengan konflik sosial keagamaan. Konflik tersebut melibatkan komunitas Sunni dan Syi'ah yang sebetulnya telah cukup lama sama-sama eksis di kota berjuduk Bondowoso Republik Kopi (BRK) tersebut. Namun, pada tahun itu, hubungan kedua komunitas yang dalam sejarahnya memang selalu dibumbui konflik kekerasan, jatuh ke dalam konflik kekerasan.<sup>1</sup>

Dalam konteks akademis, keberadaan Sunni dan Syi'ah di Bondowoso, terutama sejak konflik kekerasan tahun 2006, telah membetot atensi para akademisi untuk melakukan penelitian. Beberapa penelitian mengenai dinamika relasi Sunni dan Syi'ah akhirnya banyak menghiasi rekam jejak penelitian mengenai harmoni sosial di Bondowoso. Sebagian besar dengan menjadikan konflik dan ketegangan Sunni dan Syi'ah sebagai konteks penelitiannya.<sup>2</sup>

Topik harmoni sosial di Bondowoso tentu bukan semata soal Sunni dan Syi'ah. Bahkan jauh sebelum gejala sosial kedua komunitas muncul, pada tahun 1985-1987 Huub De Jong telah merekam jejak ketegangan sosial yang terjadi di antara sesama bangsa Arab di Bondowoso. Ketegangan yang dimaksud berhubungan dengan relasi dua segmen Arab Hadhrami yang diwakili oleh kalangan *sadab*, keturunan Nabi Muhammad pada satu sisi serta arab *syekh* pada sisi lain.<sup>3</sup> Konflik terjadi di antara kedua kelompok di

---

<sup>1</sup> M Khusna Amal, MK. & Ahmad Fajar Shodiq, “Konflik Sunni-Syi’ah Di Indonesia Kontemporer: Polarisasi, Deskriminasi Dan Kekerasan Agama”, *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* Volume 5, Nomor 2, Desember 2019, hal. 208-237

<sup>2</sup> Beberapa penelitian yang fokus meneliti harmoni sosial keagamaan di Bondowoso, terutama dengan subjek relasi Sunni dan Syi'ah diantaranya adalah Ahmad Syaukani, “Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso”, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol. VIII, no 31 (Juli-September 2009); M Khusna Amal & Ahmad Fajar Shodiq, “Konflik Sunni-Syi’ah Di Indonesia Kontemporer: Polarisasi, Deskriminasi Dan Kekerasan Agama”, *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* Volume 5, Nomor 2, Desember (2019), 208-237; M Khusna Amal, *Towards a Deliberative Conflict Resolution? A Reflection on State*, *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)* Volume 8, Number 2 (2020), 226-256; Moh Syaeful Bahar & Ahmad Khubbi Ali, *Polarisasi Arab dan Relasi Sosial Intra Etnik di Dalamnya: Studi Kasus Posisi Kamunitas Jama ah Bondowoso dalam Diskursus Kebangsaan*, (docplayer: 2021), 1-22; Fawaizul Umam, *Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagamaan: Kasus Peringatan Milad Fatimah di Bondowoso dalam Ahmad Zainul Hamdi & Marzuki Wahid (ed.), Ruang untuk yang Kecil dan Berbeda* (Yogyakarta: Gading, 2017), 171-244

<sup>3</sup> Huub De Jonge, *Mencari Identitas* (Jakarta: KPG, 2019), XVII

Bondowoso. Dan relasi konfliktual keduanya bertahan lama serta semakin menajam ketika juga dibumbui oleh aroma persaingan ideologis Sunni Asy'ariyah dan Wahabiyah.<sup>4</sup> Kalangan Arab *sadab* merupakan pengikut Asy'ariyah yang secara kelembagaan diwakili oleh organisasi Al-Falah Al-Khairiyah. Sementara kelompok non-*sadab* merupakan penganut madhab wahabiyah serta direpresentasikan oleh Al Irsyad Al Islamiyah (jejak panjang ketegangan keduanya bisa dibaca di dalam penelitian Deliar Noer).<sup>5</sup>

Meski cerita ketegangan Sunni dan Syiah lebih mengemuka saat ini, namun jejak ketegangan antara Al-khairiyah dan Al Irsyad atau antara *sadab* dan non-*sadab* tidak benar-benar hilang. Bahkan ketegangan antara *Sadab* dan non-*sadab* menjadi salah satu serpihan *puzzle*, di samping konflik Sunni dan Syiah, yang melengkapi dinamika konflik dan ketegangan di kalangan Arab Bondowoso. Menariknya, episode ketegangan dan konflik di Bondowoso, sebagaimana tergambar dalam ketegangan Sunni dan Syiah, serta antara Al-Khairiyah dan Al-Irsyad, terkonsentrasi di kawasan kampung Arab Bondowoso sebagai pusat pemukiman kalangan Arab. Sehingga, dimensi konflik yang mengemuka selalu bertemali dengan latar belakang etnis Arab ketimbang masyarakat lokal yang berlatar belakang kultur Pandalungan. Meski demikian, bukan berarti konflik yang melibatkan komunitas Pandalungan tidak muncul sama sekali. Malah, kisah kelam konflik Sunni dan Syiah yang pertama kali terjadi di Bondowoso pada tahun 2006, justru juga melibatkan masyarakat lokal. Tepatnya warga Syiah dari kalangan Pandalungan yang berada di kecamatan Jambesare Darussalah yang sebetulnya bisa disebut sebagai kawasan *subaltern* bagi kampung Arab yang menjadi pusat utama komunitas Syi'ah.<sup>6</sup>

Di kampung Arab di mana pusat penyebaran Syiah berasal dan berkembang, justru tidak pernah mengalamj konflik kekerasan. Jejak konflik kekerasan malah berkaitan dengan relasi al Falah Al Khairiyah dan Al Irsyad. Bisa jadi, hal ini disebabkan oleh sejarah panjang persaingan internal Arab antara keturunan nabi (*sadab*) dengan *syekh* (non-*sadab*).<sup>7</sup> Hal tersebut berbeda dengan Sunni dan Syi'ah, di mana masing-masing pengikutnya masih terikat oleh kesamaan identitas yang sama-sama merupakan keturunan Nabi atau *sadab*.

Meskipun cerita mengenai ketegangan Sunni dan Syi'ah serta Al-Khairiyah dan Al Irsyad menghamparkan fakta mengenai dominannya peran

<sup>4</sup> Syaeful Bahar & Ahmad Khubbi Ali, *Polarisasi Arab dan Relasi Sosial Intra Etnik di Dalamnya...*, 1-22

<sup>5</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982), 68-79

<sup>6</sup> Khusna Amal & Fajar Shodiq, "*Konflik Sunni-Syi'ah Di Indonesia Kontemporer: Polarisasi, Deskriminasi Dan Kekerasan Agama*"..., 208-237

<sup>7</sup> Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia...*, 74

etnis Arab di dalamnya, namun kisah kekerasan Sunni Syiah tahun 2006 mengajak kita untuk tidak mengabaikan keterlibatan komunitas lokal Pandalungan dalam konflik sosial keagamaan yang terjadi. Terlebih, sejak pemerintahan Bondowoso tahun 2008, ketegangan yang terjadi dalam konteks relasi Sunni dan Syiah juga banyak digerakkan oleh warga-warga lokal Bondowoso yang berkolaborasi dengan sebagian warga Arab yang saling bersebrangan. Demonstrasi yang terjadi pada tahun 2016 yang digerakkan oleh aliansi masyarakat yang menamakan diri Forum Komunikasi Ulama' Sunni (Fokus) jelas digerakkan salah satunya oleh tokoh agama non Arab. Bahkan, saat demonstrasi menolak Syi'ah pada tahun 2016 silam, banyak pesertanya yang sebetulnya merupakan warga NU akar rumput.<sup>8</sup>

Bagi pemerintah Kabupaten Bondowoso, situasi ini jelas menjadi noktah hitam yang mencoreng jejak putih tenang dan damainya relasi masyarakat di dalamnya. Untuk itulah, pemerintahan Bondowoso berkepentingan untuk melakukan *recovery* relasi sosial sehingga situasi damai kembali terwujud. Tidak hanya dalam konteks Sunni dan Syi'ah yang di beberapa kawasan lain banyak dipenuhi konflik kekerasan. Tetapi juga dalam kerangka relasi lintas agama di mana Bondowoso menjadi rumah bagi pelbagai kelompok pemeluk agama yang berbeda-beda.

Pada tahun 2008, Bondowoso melaksanakan hajatan demokrasi langsung di mana untuk pertama kalinya pemilihan kepada daerah langsung dilaksanakan. Saat itu, peneliti (Amin Said Husni) yang berpasangan dengan A. Haris Sonhaji, terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Bondowoso periode 2008-2013. Nakhoda baru pemerintah daerah Bondowoso saat itu memiliki banyak pekerjaan rumah untuk segera ditunaikan. Salah satunya melakukan pemulihan situasi sosial untuk menciptakan harmoni dalam konteks relasi keagamaan, baik lintas agama (*inter religious relation*) maupun antar kelompok dalam satu agama (*intra-religious relation*).

Pemerintahan Kabupaten Bondowoso sejak periode 2008 hingga saat ini, bisa dikatakan berhasil mencegah konflik sosial pecah kembali. Hubungan Sunni dan Syi'ah yang sempat jatuh ke dalam konflik kekerasan, juga berhasil diredam. Sementara relasi lintas agama juga tetap dalam situasi damai. Situasi ini terus bertahan hingga periode kedua peneliti memimpin Bondowoso selama dua periode (2013-2018) yang saat itu berpasangan dengan KH. Salwa Arifin, Bupati Bondowoso saat ini. Situasi tersebut kemudian terus bertahan hingga saat ini. Keberhasilan menjaga damai di tengah potensi ketegangan sektarian mengantarkan Bondowoso meraih apresiasi dan penghargaan Pemerintahan Inklusif dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU) bekerjasama dengan Center for Marginalized Communities Studies

<sup>8</sup> Fawaizul Umam, *Praktik Pemerintahan Inklusif...*, 171-244

(CMARRs) pada tahun 2017. Bondowoso dipandang berhasil menciptakan harmoni sosial melalui praktik pemerintahan yang inklusif.<sup>9</sup>

Tentu keterlibatan semua pihak patut diapresiasi dalam upaya menjaga harmoni sosial di Bondowoso. Sebab, situasi damai di Bondowoso tidak bisa terwujud jika hanya mengandalkan peran struktur Negara dalam hal ini pemerintah kabupaten Bondowoso. Peran serta seluruh elemen sosial sangat penting dalam rangka berpartisipasi menjaga harmoni sosial.

Para pemimpin informal sebagai elit lokal jelas memiliki peran penting dan nyata. Pelibatan para elit lokal untuk turut serta menjaga harmoni menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah. Sehingga, keberhasilan menjaga damai di Bondowoso, merupakan buah sinergi dari dua elemen aktor perdamaian, yaitu aktor struktural yang diwakili oleh pemerintah daerah Bondowoso, dengan aktor kultural yang dalam hal ini direpresentasikan oleh elit lokal sebagai pemimpin informal, khususnya para tokoh dan kiai yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama’.

Keterlibatan para tokoh lokal dalam memelihara perdamaian di tengah pelbagai situasi ketegangan sosial terlihat nyata pada saat rencana pelaksanaan Milad Fatimah yang diselenggarakan oleh kalangan Syi’ah, pada tahun 2016 silam. Saat itu, beberapa aliansi massa yang tergabung dalam Fokus menggelak aksi menolak pelaksanaan Milad Fatimah. Suasana mencekam menyelimuti relasi beragama di Bondowoso.<sup>10</sup>

Mencegah munculnya konflik kekerasan di antara kedua komunitas, pemerintah Bondowoso secara responsif mengambil langkah-langkah untuk menetralsir keadaan. Selain memanfaatkan kekuatan-kekuatan formal Negara, yang lebih penting lagi adalah pelibatan kekuatan-kekuatan kultural dan lokal yang salah satunya dilakukan dengan membuka ruang dialog dengan para tokoh Sunni dan Syiah. Bahkan, suara para elit lokal dari kedua komunitas inilah yang lebih banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan ketegangan.

Pemerintah saat itu meminta elit-elit Syi’ah untuk bisa meredam situasi dengan mendorong agar ekspresi keagamaan Syi’ah dilakukan dengan mempertimbangkan eksistensi komunitas lain. Sementara itu, para Kiai dan elit NU juga dilibatkan untuk meredam amarah warga muslim Bondowoso yang sebagian besar adalah Nahdliyyin. Para tokoh NU kemudian merespon ajakan ini dengan dilandasi oleh semangat menjaga harmoni sosial di Bondowoso serta sebagai pengejawantahan dari model dakwah NU yang memang senantiasa berusaha menghindari konflik kekerasan.

---

<sup>9</sup> Dodik Harnadi, Suheri, Faqih Yahullahbi &, Siddik, Rekam Jejak 10 Tahun Masa Bakti Amin Said Husni (Bondowoso: Bappeda, 2018), 126

<sup>10</sup> “Massa Suni Tolak Milad Fatimah di Bondowoso”, Okezone, 3 April 2016

Kolaborasi kedua entitas Negara atau pemerintah dengan elit lokal bahkan dilembagakan melalui forum silaturahmi pemerintah dan tokoh agama. Forum tersebut bertajuk Forum Pimpinan Daerah-Tokoh Agama Tokoh Masyarakat (Forpimda-Toga Tomas) yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dibawah koordinasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Bondowoso. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh unsur Forkompimda sebagai representasi dari entitas Negara atau pemerintah, serta para tokoh agama seperti para kiai dan tokoh masyarakat sebagai representasi dari elit atau aktor lokal.

Forum ini menjadi wadah sinergi konstruktif dari elemen pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan situasi sosial yang harmonis. Forum ini juga diproyeksikan sebagai sumber perencanaan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam konteks sosial, terutama dalam ikhtiar menjaga relasi keagamaan yang damai di antara masyarakat Bondowoso.<sup>11</sup>

Dengan demikian, keberhasilan menjaga harmoni sosial di Bondowoso adalah produk dari dua entitas struktur Negara dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bondowoso, serta aktor lokal yang terdiri dari para elit lokal informal khususnya para Kiai. Kolaborasi kedua entitas ini tidak hanya terlihat dari resolusi ketegangan Sunni dan Sy'ah, tetapi juga dalam konteks membingkai harmoni di antara beragam pemeluk agama yang berbeda seperti Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Berangkat dari gambaran mengenai pemeliharaan harmoni keagamaan di Bondowoso yang melibatkan kedua entitas pemerintah dan elit lokal, maka penelitian ini dilakukan dalam upaya memahami kolaborasi keduanya dalam perspektif pembangunan perdamaian campuran (*hybrid peacebuilding*). Perdamaian campuran merupakan salah satu pendekatan terbaru dalam pembangunan perdamaian yang berbasis pada kolaborasi kekuatan struktur institusi global atau Negara serta kekuatan-kekuatan lokal.<sup>12</sup>

Untuk memberikan fokus serta batasan yang jelas mengenai penelitian ini, berikut dirumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian. Pertanyaan penelitian berkaitan dengan apa yang ingin dipahami oleh peneliti mengenai fenomena yang diteliti (Given, 2008).<sup>13</sup> Selain merepresentasikan apa yang berusaha dipahami, pertanyaan penelitian juga mengetengahkan sudut pandang yang digunakan untuk menyingkap pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Pertama, bagaimana potret harmoni keagamaan di Kabupaten Bondowoso? Kedua, bagaimana strategi pemerintah Bondowoso

<sup>11</sup> Dodik Harnadi, *Rekam Jejak 10 Tahun...*, 114

<sup>12</sup> Baca Oliver Richmond, *The Dilemmas of a Hybrid Peace*, E-International Relations (Desember 2012), 1-8 dan Roger MacGinty, *Hybrid Peace: The Interaction Between Top-Down and Bottom-Up Peace*. *Security Dialogue*, 41. 4 (2010), 391-412

<sup>13</sup> Lisa M Given, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. (2008), 1-31

membangun perdamaian dalam perspektif pembangunan perdamaian campuran?

Beberapa penelitian telah dilakukan dengan menjadikan Bondowoso sebagai setting penelitian. Hal ini menunjukkan Bondowoso menyediakan ruang yang representative bagi pengembangan aktivitas riset.<sup>14</sup> Tertutama dalam tema-tema yang berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat Bondowoso. Bondowoso memang unik karena merepresentasikan dua kebudayaan sekaligus, Madura dan Jawa. Penelitian Ayu Sutarto merupakan pioneer dari arus penelitian yang mengambil Bondowoso sebagai situsnya. Dalam penelitian tersebut, Ayu Sutarto memperkenalkan konsep Pandalungan, untuk menyebut kultur hibriditas masyarakat Bondowoso yang terbentuk oleh dua entitas budaya utama, Jawa dan Madura.

Sebagai entitas sosial yang terbentuk oleh kebudayaan ganda, masyarakat Bondowoso memiliki cara pandangan yang akomodatif dan menghargai perbedaan. Karena itulah, konflik sosial relative bisa dihindari dibandingkan daerah-daerah lainnya.<sup>15</sup> Harmoni sosial menandai corak dominan relasi sosial masyarakat Bondowoso. Meski demikian, konflik bukan tidak terjadi sama sekali. Konflik disini mengambil bentuk dalam gejala yang lebih luas dari sekadar ketegangan di antara dua kelompok atau individu. Konflik juga teradi dalam kaitannya dengan kesenjangan di antara dua nilai yang mendapatkan apropriasi berbeda. Misalnya, Dodik Harnadi meneliti tentang resistensi sosial yang muncul dari kesenjangan hukum Negara dengan hukum sosial dalam konteks penegakan undang-undang perlindungan anak. Kultur tradisional masyarakat Bondowoso, termasuk kuatnya pemahaman keislaman yang menjadi salah satu unsure pembentuk budaya masyarakat, membuat bentuk-bentuk yang disebut kekerasan dalam undang-undang Negara, kadangkala

---

<sup>14</sup> Beberapa penelitian yang menjadikan Bondowoso sebagai setting diantaranya adalah M Khusna Amal, *Towards a Deliberative Conflict Resolution? A Reflection on State*, Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) Volume 8, Number 2 (2020), 226-256; M Khusna Amal, "Protecting Civil Rights Amidst Rising Illiberalism in Indonesia's Democracy: State's Response to Sharia-Based Violence Against Shi'a Groups." *Ulumuna*, 24(2), (2020), 296-319; Fawaizul Umam, *Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagamaan: Kasus Peringatan Milad Fatimah di Bondowoso dalam Ahmad Zainul Hamdi & Marzuki Wahid (ed.), Ruang untuk yang Kecil dan Berbeda (Yogyakarta: Gading, 2017), 171-244; Dodik Harnadi, Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum (Bondowoso: Licensi, 2020); Moh Syaeful Bahar, *Kiai dan Bejangan: Local Strongman Pasca Orde Baru* (Surabaya: Imtiyaz, 2021)*

<sup>15</sup> Ayu Sutarto, *Sekilas Tentang Masyarakat Pandalungan*. Makalah dalam *Jelajah Budaya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta*, 7-10 Agustus (2006), 1-7

bersinggungan dengan kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>16</sup> Kondisi tersebut kemudian memunculkan resistensi di kalangan masyarakat Bondowoso sebagai konsekuensi munculnya kesenjangan hukum (*legal gap*) antara hukum Negara dengan hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Meski memberikan perhatian terhadap resistensi sosial, namun studi tersebut tidak menyentuh sama sekali tema seputar penyelesaian konflik dan ketegangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat serta upaya mewujudkan harmoni di antara mereka.

Pada lanskap politik, penelitian Syaeful Bahar (2021) patut diketengahkan karena terkait erat dengan dimensi konflik dan harmoni sosial. Meski hanya menyoroti dua entitas elit local, Kiai dan Bejangan pada even-even politik, namun dinamika relasi yang berkembang di antara keduanya jelas memengaruhi masyarakat Bondowoso di akar rumput sebagai pengikut atau *client* dari kedua patron tersebut. Melalui penelusuran yang dilakukannya, terungkap bagaimana kedua segmen menampilkan relasi yang kompleks mulai dari koeksistensi hingga tensi atau konflik.<sup>17</sup>

Beberapa riset yang menyoroti situasi konflik dan ketegangan di Bondowoso lebih berkaitan erat dengan konflik keagamaan (*religious conflict*) yang secara khusus berangkat dari relasi ketegangan kelompok Sunni dan Syi'ah. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan konflik keagamaan di Bondowoso hampir selalu mengaitkannya dengan eksistensi dua kelompok Sunni dan Syi'ah.<sup>18</sup> Amal misalnya<sup>19</sup>, menyoroti bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan pendekatan inklusif untuk mengatasi ketegangan Sunni dan Syi'ah serta memelihara perdamaian di antara kedua kelompok. Dengan menggunakan gagasan *deliberative conflict resolution*, Amal menyoroti bagaimana pemerintah daerah berhasil membangun resolusi konflik yang menegdepankan akomodasi para partisan yang terlibat dalam situasi ketegangan melalui negosiasi, diskusi dan kompromi. Hanya saja Amal mencatat, bahwa praktik tersebut memiliki keterbatasan dari sisi keterlibatan kelompok Syi'ah yang cenderung minim.

---

<sup>16</sup> Lihat Harnadi, Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum ....

<sup>17</sup> Lihat Bahar, Kiai dan Bejangan: Local Strongman Pasca Orde Baru ...

<sup>18</sup> Lihat misalnya Khusna Amal, Towards a Deliberative Conflict Resolution? A Reflection on State..., 226-256; Khusna Amal, Protecting Civil Rights Amidst Rising Illiberalism in Indonesia's Democracy: State's Response..., 296-319; dan Fawaizul Umam, Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagamaan..., 171-244

<sup>19</sup> Khusna Amal, Towards a Deliberative Conflict Resolution? A Reflection on State..., 226-256

Pada penelitian yang lain, Amal<sup>20</sup> juga menegaskan peran inklusif pemerintah daerah Bondowoso dalam merespon ketegangan Sunni dan Syi'ah. Pendekatan inklusif yang dijalankan pemerintah tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin hak-hak keagamaan kaum minoritas Sunni serta melindungi eksistensi mereka. Pendekatan ini menurut Amal berhasil melahirkan situasi dimana eksistensi kalangan Syi'ah terlindungi hak-hak asasi dan kebebasan mereka.

Penelitian lain yang dilakukan Fawaizul Umam juga memberikan atensi terhadap keterlibatan Negara dalam hal ini pemerintah daerah Bondowoso dalam merespon situasi konflik Sunni dan Syi'ah. Umam, seperti Amal, memberikan perhatian khusus kepada peran pemerintah daerah yang cukup berhasil mewujudkan harmoni dengan praktik pemerintahan inklusif yang berbasis kepada perlindungan hak-hak dasar semua warga, terutama minoritas Syi'ah. Ada beberapa keterbatasan yang dijumpainya terkait dengan jaminan perlindungan hak-hak beragama kaum Syi'ah.<sup>21</sup>

### Memahami Konflik Perdamaian dan Harmoni Sosial

Kata peace (damai/perdamaian) sering dianggap menjadi lawan dari kata konflik atau kekerasan. Memang demikianlah kata peace dalam studi perdamaian digunakan. Kata damai dapat dipahami dalam tiga prinsip utama.<sup>22</sup> Pertama, kata perdamaian, merujuk kepada tujuan sosial yang perlu dicapai oleh setiap orang atau kelompok. Kedua, sebagai tujuan sosial, upaya untuk mewujudkannya membutuhkan proses yang kompleks dan rumit, namun mungkin untuk diwujudkan. Ketiga, konflik sebagai tiadanya kekerasan, harus dianggap sebagai pernyataan yang valid.

Ada banyak definisi yang diketengahkan para sarjana ilmu sosial tentang perdamaian. Jika Galtung memaknai perdamaian dalam oposisinya terhadap konflik dan kekerasan, maka Cohrs dkk.<sup>23</sup> mendefinisikan perdamaian tidak sekadar tiadanya kekerasan, melainkan juga hadir dan berkembangnya relasi sosial yang harmonis. Dengan demikian, situasi damai adalah situasi harmonis, dimana konflik dan kekerasan tidak terjadi serta jalinan relasi yang disebut harmonis juga terwujud.

Kata harmoni sebetulnya merujuk kepada pengertian yang dekat dengan damai. Sebab, apa yang disebut relasi harmonis, hanya mungkin

<sup>20</sup> Khusna Amal, *Protecting Civil Rights Amidst Rising Illiberalism in Indonesia's Democracy: State's Response...*, 296-319

<sup>21</sup> Fawaizul Umam, *Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagamaan...*, 171-244

<sup>22</sup> Johan Galtung, "Violence, Peace, and Peace Research". *Journal of Peace Research*, 6, 3 (1969), 167-191.

<sup>23</sup> J Christophers Cohrs, Daniel J Christie, Mathew P White, & Chaitali Das, *Contributions of positive psychology to peace: Toward global well-being and resilience. American Psychologist*, 68, 7(2013), 590-600

terjadi saat keadaan damai dan jauh dari konflik kekerasan. Harmoni sendiri merupakan kondisi yang ditandai dengan saling menghormati, membangun kepercayaan, menebar perdamaian dan seterusnya di antara sesama anggota sosial.<sup>24</sup>

Sebaliknya, disharmoni dan konflik muncul dalam situasi terjadinya permusuhan, kebencian satu sama lain, kekerasan hingga peperangan. Harmoni dan damai berada dalam satu spectrum yang sama, sebagaimana konflik dan disharmoni juga demikian. Karena itulah, sebagaimana damai, kata harmoni juga sebagian pahami sebagai oposisi dari konflik atau disharmoni<sup>25</sup>

Harmoni dan damai dipahami sebagai aspek yang esensial dalam masyarakat. Adanya system sosial senantiasa diarahkan kepada terwujudnya harmoni dan damai dengan segala konsep yang berkenaan dengannya, seperti kohesi dan integrasi. Karena itulah, masyarakat yang harmonis dan damai adalah masyarakat yang diidealkan. Sebaliknya, setiap kondisi yang menyimpang dari keadaan harmonis dan damai, dipandang sebagai distorsi yang harus dihindari dan saat muncul harus segera diatasi. Tentu pandangan diatas bukan satu-satunya yang muncul di dalam perspektif sosiologi. Cara pandang yang melihat harmoni, kohesi dan integrasi sebagai hal yang esensial dan ideal dalam masyarakat merupakan pandangan kalangan structural fungsional yang memiliki ciri positivistik.<sup>26</sup> Tesis tersebut berbeda dengan para penganut teori konflik.

Karl Marx, sebagai contoh, merupakan salah satu yang paling populer di antara teoretisi ilmu sosial yang berpandangan bahwa konflik merupakan situasi yang esensial dalam masyarakat, berkebalikan dengan pandangan para penganut structural fungsional. Bagi Marxisme, konflik tidak bisa dihindarkan karena hanya dengan cara ini perubahan yang revolusioner dalam hierarki system kelas bisa diwujudkan. Marxisme mengambil posisi yang secara tegas bersebrangan dengan liberalism karena menganggap bahwa konflik kelas tidak mungkin dihindari. Mereka juga menolak pemikiran yang berpendirian bahwa tujuan sosial (social goal) adalah mewujudkan harmoni.<sup>27</sup>

Dalam rangka mewujudkan harmoni dan mencegah sebaliknya, maka dikenal beberapa konsep yang lahir dari upaya untuk mencegah konflik dan memelihara perdamaian. Setidaknya terdapat tiga konsep yang cukup populer

<sup>24</sup> Manisha Sharma, "Social Harmony for Being Social", *Global Journal of Human-Social Science: Sociology & Culture* Volume 15 Issue 6 (April 2015), 1-4

<sup>25</sup> Trine Brox & Ildikó Bellé Hann, *On the Fringes of Harmonious Society Tibetans and Uyghurs in Socialist China* (Copenhagen: NIAS Press, 2014), 4

<sup>26</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik...*

<sup>27</sup> Grame Duncan, *Marx and Mill: Two Views of Social Conflict and Social Harmony* (Cambridge: Cambridge University Press, 1973), 206

berkaitan dengan ikhtiar menjaga perdamaian atau harmoni. Ketiganya adalah peacemaking, peacekeeping dan peacebuilding. Ketiganya sering digunakan secara tumpang tindih, padahal satu dengan yang lain memiliki pengertian dan proses yang berbeda dalam konteks perdamaian.

Mengutip Reyhler,<sup>28</sup> peacemaking adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka membawa permusuhan atau konflik yang terjadi ke dalam satu kesepakatan atau perjanjian damai. Peacekeeping adalah tindakan melibatkan kekuatan militer perdamaian serta kekuatan sipil untuk memberikan ruang berjalannya proses peacemaking ataupun mencegah konflik kekerasan. Peacebuilding adalah tindakan untuk mengidentifikasi struktur-struktur yang memiliki potensi merawat perdamaian serta mencegah terjadinya konflik

Merujuk kepada ketiga konsepsi tersebut, maka dua tindakan pertama beroperasi dalam ruang sosial dimana konflik muncul ke permukaan. Sebaliknya, kata peacebuilding beroperasi dalam ruang sosial yang terdapat potensi konflik kekerasan namun setiap pihak berusaha mencegahnya muncul ke permukaan menjadi konflik kekerasan. Pada penelitian ini, kata peacebuilding dipilih untuk dimanfaatkan ketimbang dua istilah lainnya. Hal ini didasari setidaknya oleh dua alasan;

Pertama, kata peacebuilding merupakan konsep yang lebih baru serta merupakan pengembangan dari kedua konsep sebelumnya. Di Uni Eropa, konsep ini menjadi arus utama dalam strategi perdamaian dibandingkan konsep peacemaking dan peacekeeping. Kedua, konsep peacebuilding lebih bisa menggambarkan ikhtiar yang dilakukan pemerintah Bondowoso dalam kerangka menjaga harmoni sosial, yaitu ikhtiar yang berorientasi pada strategi jangka panjang (longterm strategy) untuk membangun kelembagaan serta pembangunan yang berkelanjutan.<sup>29</sup>

### Hybrid Peace ; Perdamaian Generasi Baru

Pembangunan perdamaian adalah proses yang berkelanjutan untuk mewujudkan perdamaian. Sebagai proses yang berkelanjutan, peacebuilding dirumuskan untuk tujuan-tujuan yang bersifat komprehensif dan jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, peacebuilding mengupayakan cara-cara damai dan transformatif. Untuk itulah, pembangunan perdamaian selalu diarahkan agar sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Luc Reyhler, "Challenges of Peace Research" dalam Luc Reyhler dan Arnim Langer (eds), *Luc Reyhler: A Pioneer in Sustainable Peacebuilding Architecture. Pioneers in Arts, Humanities, Science, Engineering, Practice*, vol 24. Springer, (2020), 271

<sup>29</sup> Luc Reyhler, *Challenges of Peace...*, 271

<sup>30</sup> Ronald J Fisher, "The Potential for Peacebuilding Forging a Bridge from Peacekeeping to Peacemaking". *Peace & Change*, 18 (1993), 247-266.

Dalam praktiknya, pembangunan perdamaian memanfaatkan pelbagai kekuatan yang potensial membangun perdamaian dalam masyarakat. Kekuatan yang dimaksud berkaitan dengan dimensi sosial, budaya dan kemanusiaan. Di atas prinsip-prinsip inilah, aktivitas pembangunan perdamaian dirumuskan untuk berjalan secara berkesinambungan.<sup>31</sup>

Pembangunan perdamaian telah mengalami perkembangan dari sisi strategi maupun konseptualisasinya secara akademis. Hal ini disebabkan oleh munculnya penyesuaian dan penyempurnaan yang menjadi kebutuhan bagi pengembangan pembangunan perdamaian baik sebagai strategi maupun teori keilmuan. Merujuk kepada konseptualisasi Richmond, perkembangan teori pembangunan perdamaian dapat diklasifikasikan ke dalam empat generasi yang masing-masing memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Keempat generasi tersebut adalah *victor's peace*, *institutional peace*, *constitutional peace* dan *civil peace*.<sup>32</sup>

Keempat kategori merepresentasikan dua orientasi utama. Pendekatan *peacebuilding victor peace* dan *institutional peace* dikenal sebagai generasi liberal atau liberal *peacebuilding*. Sementara dua yang terakhir, merupakan generasi yang berorientasi kepada partisipasi kekuatan local dan karena itu bersifat *bottom up*.<sup>33</sup> Kombinasi pembangunan perdamaian yang berdimensi liberalistic dan partisipatoris melahirkan generasi baru yang dikenal sebagai *hybrid peace*.<sup>34</sup>

Secara konseptual, gagasan mengenai perdamaian campuran lahir dari adanya kritik yang dilancarkan oleh beberapa kalangan terhadap pendekatan perdamaian yang liberalistic. Pendekatan liberal dianggap terlalu berpusat pada kekuatan internasional dengan segala institusi yang lahir darinya, termasuk Negara. Sementara kekuatan local, menjadi marginal dalam pembangunan perdamaian tersebut. Padahal, para actor local adalah orang dalam yang terlibat secara langsung dalam dinamika interaksi sosial, sementara mereka yang dianggap merepresentasikan institusi global structural merupakan kelompok luar yang asing dengan situasi sosial di lapangan. Kritik

<sup>31</sup> Kawser Ahmed, *Grasroot Approaches to Community-Based Peacebuilding Initiatives* (Ney Work: Lexingtons Books, 2017), 43

<sup>32</sup> Dorota Piotrowska, *The Value of Culture in Peacebuilding : Examples from Democratic Republic of Congo, Yemen and Nepal*, (New York: City University of New York, 2015), 7

<sup>33</sup> Roger Mac Ginty, *Everyday Peace; Bottom up and Local Agency in Conflict Affected Societies Security Dialogue*, vol. 45, 6 (2014), 548-564

<sup>34</sup> Heidi Mõttus, *A new generation in peacebuilding? A comparative study of the emergence of the hybrid peace* (2018).

ini kemudian melahirkan perdamaian yang berorientasi kepada local sebagai titik pijaknya, local turn.<sup>35</sup>

Meski demikian, pendekatan yang berorientasi local juga tidak sepi dari kritik. Sebagian pihak mengkritik pendekatan local karena dianggap tidak mewakili realitas dunia yang tidak lagi memadai untuk dikotak-kotakkan ke dalam oposisi biner local-global. Mereka yang mengkritik balik pendekatan local berlandung dibalik argumentasi bahwa batas antara global dan local telah sirna, demikian juga klasifikasi keduanya lebih merupakan instrumentalisasi kekerasan structural yang tidak bisa dipertahankan.<sup>36</sup>

Karena itulah, untuk keluar dari tarikan dua sentrum local dan global sebagaimana dalam pendekatan liberal dan postliberal, lahirlah gagasan pembauran keduanya, hybridity, sebagai salah satu pendekatan baru dalam membangun perdamaian. Bentuk perdamaian campuran merupakan sintesa dari “cetak biru internasional bentuk liberal-neo liberal Negara, pembangunan, Negara hukum, dan institusi politik dengan dinamika sosial historis local dari situasi konflik.”<sup>37</sup>

Dengan demikian, dalam pembangunan perdamaian campuran, praktik penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian, tidak berpusat pada salah satu titik local atau global, melainkan berusaha mengakomodasi keduanya untuk mewujudkan tujuan-tujuan secara efektif. Dalam konteks pembangunan campuran, aspek-aspek yang merepresentasikan cetak biru internasional seperti Negara dengan segala institusinya, diramu menjadi satu kesatuan dengan kemampuan lokal seperti kebudayaan, norma dan entitas yang bermakna secara lokal.

Dalam redaksi lain, Mac Ginty menjelaskan perdamaian campuran sebagai interface di antara perdamaian yang berorientasi kepada struktur global atau internasional dengan perdamaian yang memanfaatkan tindakan berbasis tradisi, lokalitas dan kebiasaan (Mac Ginty, 2010).<sup>38</sup> Ginty, bersama Richmond, yang dikenal sebagai salah seorang yang terdepan dalam merumuskan perdamaian campuran berpendapat bahwa proses perdamaian dan harmoni yang terwujud di masyarakat, terutama di masa setelah terjadinya

---

<sup>35</sup> Yuji Uesugi, Anna Deekeling & Anton Ingstedt, A Brief Sketch of Hybrid Peacebuilding. dalam: Yuji Uesugi, Anna Deekeling & SS Umeyama & L McDonald-Colbert (eds) Operationalisation of Hybrid Peacebuilding in Asia. Security, Development and Human Rights in East Asia. Palgrave Macmillan, Cham (2021)

<sup>36</sup> Oliver P Richmond & Roger Mac Ginty, “Where now for the critique of the liberal peace?”. *Cooperation and Conflict*, 50. 2 (2015), 171–189.

<sup>37</sup> Oliver P Richmond, “The Dilemmas of a Hybrid Peace”. *E-International Relations* (2012)

<sup>38</sup> Roger MacGinty, “Hybrid Peace: The Interaction Between Top-Down and Bottom-Up Peace”. *Security Dialogue*, 41,4 (2010), 391–412.

konflik, cenderung lahir dari kontribusi pihak eksternal dan internal. Karena itulah, keduanya harus diletakkan dalam proses yang beriringan dalam membangun perdamaian, ketimbang diletakkan pada opisi biner satu dengan yang lain.

Secara operasional, penerapan hybrid peace dalam mewujudkan harmoni menitikberatkan kepada beberapa hal berikut. Pertama, adanya kemampuan dari para agen perdamaian liberal peace, seperti NGO global, struktur Negara dan sejenisnya untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan local. Kemampuan menyesuaikan diri ini berkaitan dengan keterbukaan para agen perdamaian di level structural untuk membuka diri dengan potensi kekuatan local yang bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan harmoni sosial.

Kedua, adanya kekuatan pendorong (*incentivizing powers*) dari para pihak yang terlibat dalam proses perdamaian untuk mengakomodasi kekuatan-kekuatan lokal. Dalam hal ini, para pihak yang selama ini dipersepsikan sebagai agen perdamaian liberal, tidak hanya memanfaatkan kemampuan memaksa yang dimiliki untuk mewujudkan harmoni, tetapi juga memanfaatkan pendekatan *persuasive* yang salah satunya menekankan kepada kebutuhan dasar masyarakat lokal.

Ketiga, adanya kemampuan dari para actor local untuk melakukan resistensi, pengabaian dan adaptasi terhadap intervensi pihak-pihak yang merepresentasikan elemen liberal seperti actor global dan Negara sebagai kekuatan structural yang memiliki kemampuan memaksa. Dengan demikian, para actor local tidak sekadar diletakkan sebagai objek tidak berkemampuan (*powerless*), melainkan didudukkan sebagai actor dengan kemampuan untuk mempertimbangkan setiap intervensi perdamaian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka sendiri.

Keempat, adanya kemampuan dari para actor local dengan segenap jaringannya untuk hadir dan memelihara bentuk-bentuk alternative perdamaian. Sebagaimana para agen liberal perlu menyesuaikan diri dengan kehendak local, maka demikian juga actor local harus terbuka dengan pelbagai kemungkinan perdamaian, termasuk yang disodorkan oleh para actor struktur global dan Negara (Mac Ginty, 2010).<sup>39</sup>

## Hasil dan Diskusi

Penelitian memiliki dua fokus utama sebagaimana dirumuskan di dalam pertanyaan penelitian. Proses penelitian ini serta hasil yang dirumuskan mengacu sepenuhnya kepada kedua fokus tersebut dengan berusaha menjawab pertanyaan penelitian. Ada dua pertanyaan penelitian yang menjadi fokus penelitian ini, pertama bagaimana potret harmoni keagamaan di

---

<sup>39</sup> Roger MacGinty, *Hybrid Peace: The Interaction Between Top-Down and Bottom-Up Peace...*, 391–412.

Kabupaten Bondowoso?. Kedua, bagaimana strategi pemerintah Bondowoso membangun perdamaian dalam perspektif pembangunan perdamaian campuran?

Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, kesimpulan ini berisi dua rumusan utama untuk menjawabnya. Rumusan pertama, potret harmoni keagamaan di Bondowoso ditandai secara umum dengan munculnya dua hal utama, sikap toleran yang terbangun di antara satu sama lain, serta sikap dan tindakan saling menghormati (*mutual respect*) di antara pelbagai kelompok keagamaan. Meski demikian, ada dua kecenderungan relasi yang berbeda yang ditampilkan oleh kelompok keagamaan dalam konteks relasi antar umat Beragama (*inter-religious relations*) dan serta internal umat beragama (*intra-religious relations*).

Potret harmoni yang lebih konstruktif ditemukan di dalam relasi antar umat beragama yang berbeda di Bondowoso. Umat Islam, Kristen, Hindu dan Budha hampir tidak pernah terlibat ketegangan dalam relasi yang dibangun. Pengalaman relasi antar umat beragama menunjukkan bagaimana Umat Islam dan umat beragama lain saling membangun sikap saling menghormati dan toleran satu sama lain. Tidak pernah muncul ketegangan dalam relasi mereka. Ini menunjukkan jalinan relasi antar umat beragama yang konstruktif.

Situasi yang agak kompleks menandai relasi di antara pelbagai paham keagamaan yang berbeda di kalangan umat Islam (*intra-religious relations*). Di Bondowoso, ada banyak paham keagamaan yang berkembang, maupun kelompok organisasi keagamaan dengan paham keagamaan yang satu sama lain berbeda. Dibandingkan relasi antar agama, relasi antar paham keagamaan di internal umat Islam justru beberapa kali dibumbui oleh konflik. Yang paling mencolok adalah konflik Sunni dan Syi'ah. Meski demikian, relasi harmonis tetap lebih dominan dalam membentuk hubungan antar paham dan kelompok keagamaan yang berbeda. Terkait konflik Sunni dan Syi'ah situasi yang ditampilkan kedua kelompok sejak pemerintahan Bondowoso tahun 2008 juga tidak pernah mengemuka menjadi konflik kekerasan. Itu berarti secara keseluruhan, meski terjadi konflik dalam bentuk ketegangan kedua kelompok, namun pemerintah berhasil mencegahnya menjadi benturan fisik dan kekerasan. Sementara relasi harmonis tetap merupakan potret yang lebih dominan.

Rumusan kedua, berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang kedua. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Bondowoso pada sejak periode pemerintahan 2008 cukup berhasil melaksanakan praktik perdamaian campuran dengan mensinergikan peran dua anasir utama; struktur pemerintah dan para tokoh agama dan masyarakat sebagai actor lokal serta segenap dinamika sosial budaya di dalamnya. Para Kiai yang secara umum berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama' menjadi actor lokal yang memiliki peran

sangat signifikan dalam mewujudkan harmoni keagamaan. Beberapa kebijakan pemerintah dalam upaya membangun harmoni serta mencegah konflik keagamaan selalu melibatkan eksistensi para Kiai dan tokoh masyarakat lain. Demikian juga, pemerintah memanfaatkan nilai-nilai lokal yang menjadi standard perilaku normatif dalam menjaga kerukunan di antara pelbagai kelompok keagamaan.

Penerapan strategi perdamaian campuran di Bondowoso mengambil bentuk dalam dua model. Pertama, kolaborasi kedua anasir dilembagakan melalui praktik-praktik perumusan kebijakan secara formal dan birokratis. Model yang pertama ini misalnya mengambil bentuk dalam serangkaian kegiatan formal yang dilakukan oleh bupati dengan membangun dialog bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengajak semua pihak berkontribusi menjaga situasi yang kondusif. Kedua, strategi yang dijalankan secara informal. Strategi kedua ini bahkan lebih dominan dalam proses pembangunan harmoni di Bondowoso. Model kedua dari praktik hybrid peace ini diterapkan melalui peran pemerintah yang sebatas memberi ruang fasilitasi dan dorongan bagi masyarakat untuk membangun perdamaian di tengah-tengah mereka. Tidak ada mekanisme formal yang berlangsung. Para actor lokal yang terlibat dalam dinamika sosial sendiri yang memiliki domain untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi. Tidak berarti pemerintah Bondowoso diam sama sekali. Pemerintah tetap berusaha mendorong agar seluruh anasir-anasir lokal yang ada dapat menjalankan fungsinya dalam mencegah konflik dan mewujudkan situasi damai. Bagaimanapun juga pemerintah menyadari, bahwa masyarakat Bondowoso memiliki nilai yang ideal dalam memandu perilaku positif masyarakat untuk menghindari konflik dan membangun harmoni social.

## **Kesimpulan**

Pembangunan harmoni sosial, terutama di bidang keagamaan, harus menjadi praktik yang berkesinambungan. Pemerintah daerah Bondowoso berkepentingan untuk selalu menghadirkan situasi sosial yang harmonis untuk menyediakan stabilitas pembangunan di segala sektor kehidupan. Tanpa situasi sosial yang kondusif, agenda pembangunan daerah tidak akan berjalan efektif.

Di samping itu, Bondowoso menjadi ruang bertemunya pelbagai identitas keagamaan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya bahkan menyimpan potensi konflik, terutama terkait relasi Sunni dan Syi'ah. Karena itulah, pemerintah Bondowoso dituntut untuk senantiasa melakukan mitigasi agar konflik yang pernah terjadi 2006 silam tidak terulang kembali

## Daftar Rujukan

Amal, M. (2020a). Towards a Deliberative Conflict Resolution? A Reflection on State Inclusive Response to Sunni-Shi'a Tension in Indonesia's Democracy. *QIJS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8(2):226, DOI: [10.21043/qjijis.v8i2.7146](https://doi.org/10.21043/qjijis.v8i2.7146)

Amal, M. (2020b). Protecting Civil Rights Amidst Rising Illiberalism in Indonesia's Democracy: State's Response to Sharia-Based Violence Against Shi'a Groups. *Ulumuna*, 24(2), 296-319. <https://doi.org/10.20414/ujis.v24i2.407>

Bahar, M. S. (2021). *Kiai dan Bejingan: Local Strongman Pasca Orde Baru*. Surabaya: Imtiyaz

Brox, Trine &, Hann, Ildikó Bellé. 2014. On the Fringes of Harmonious Society *Tibetans and Uyghurs in Socialist China*. Copenhagen: NIAS Press

Cohrs, J. C., Christie, D. J., White, M. P., & Das, C. (2013). Contributions of positive psychology to peace: Toward global well-being and resilience. *American Psychologist*, 68(7), 590-600. <https://doi.org/10.1037/a0032089>

Cohrs, J. C., Christie, D. J., White, M. P., & Das, C. (2013). Contributions of positive psychology to peace: Toward global well-being and resilience. *American Psychologist*, 68(7), 590-600. <https://doi.org/10.1037/a0032089>

Coser, L. A. (1957). Social Conflict and the Theory of Social Change. *The British Journal of Sociology*, 8(3), 197-207. <https://doi.org/10.2307/586859>

Duncan, Grame (1973). *Marx and Mill: Two Views of Social Conflict and Social Harmony*. Cambridge: Cambridge University Press

Fisher, R.J. (1993). *THE POTENTIAL FOR PEACEBUILDING Forging a Bridge from Peacekeeping to Peacemaking*. *Peace & Change*, 18, 247-266.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191. <http://www.jstor.org/stable/422690>

Given, L. M. (2008). *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods* (Vols. 1-0). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412963909

Given, L. M. (2008). *The SAGE encyclopedia of qualitative research methods* (Vols. 1-0). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. doi: 10.4135/9781412963909

Harnadi, D. (2020). Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum. Bondowoso: Licensi

Kawser Ahmed, 2017. *Grasroot Approaches to Community-Based Peacebuilding Initiatives*. Ney Work: Lexingtons Books

Mac Ginty, Roger (2014). *Everyday Peace; Bottom up and Local Agency in Conflict Affected Societies Security Dialogue*, vol. 45 (6), hal. 548-564

MacGinty, R. (2010). Hybrid Peace: The Interaction Between Top-Down and Bottom-Up Peace. *Security Dialogue*, 41(4), 391–412. <http://www.jstor.org/stable/26301105>

MacGinty, R., Richmond, O. (2016). The fallacy of constructing hybrid political orders: A reappraisal of the hybrid turn in peacebuilding. *International Peacekeeping*, 23(2), 219–239. <https://doi.org/10.1080/13533312.2015.1099440>

MacGinty, R., Richmond, O. (2016). The fallacy of constructing hybrid political orders: A reappraisal of the hybrid turn in peacebuilding. *International Peacekeeping*, 23(2), 219–239. <https://doi.org/10.1080/13533312.2015.1099440>

Möttus, H. (2018). *A new generation in peacebuilding? A comparative study of the emergence of the hybrid peace*.

Otomar Bartos & Paul Wehr (2002). *Using Conflict Theory*. Cambridge: Cambridge University Press

Piotrowska, Dorota (2015). *The Value of Culture in Peacebuilding : Examples from Democratic Republic of Congo, Yemen and Nepal*, City University of New York

Reychler, L., Langer, A. (2020). Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding. In: Reychler, L., Langer, A. (eds) *Luc Reychler: A Pioneer in Sustainable Peacebuilding Architecture. Pioneers in Arts, Humanities, Science, Engineering, Practice*, vol 24. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-40208-2\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-030-40208-2_13)

Reychler, L., Langer, A. (2020). Peacemaking, Peacekeeping, and Peacebuilding. In: Reychler, L., Langer, A. (eds) *Luc Reychler: A Pioneer in Sustainable Peacebuilding Architecture. Pioneers in Arts, Humanities, Science, Engineering, Practice*, vol 24. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-40208-2\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-030-40208-2_13)

Richmond, O. (2012). *The Dilemmas of a Hybrid Peace* <https://www.e-ir.info/2012/12/23/the-dilemmas-of-a-hybrid-peace/>

Richmond, O. P., & Mac Ginty, R. (2015). Where now for the critique of the liberal peace? *Cooperation and Conflict*, 50(2), 171–189. <https://doi.org/10.1177/0010836714545691>

Richmond, O.P & Mitchell, A. (2012). Hybrid Forms of Peace: From Everyday Agency to Post-Liberalism - Rethinking Peace and Conflict Studies. Macmillan: Palgrave Macmillan

Sharma, Manisha. (2015) Social Harmony for Being Social. Global Journal of HUMAN-SOCIAL SCIENCE:C Sociology & Culture Volume 15 Issue 6 Version 1.0 Available from: [https://www.researchgate.net/publication/321913604\\_Social\\_Harmony\\_for\\_Being\\_Social](https://www.researchgate.net/publication/321913604_Social_Harmony_for_Being_Social) [accessed April 17 2022].

Simmel, G. (1904). The Sociology of Conflict. I. *American Journal of Sociology*, 9(4), 490–525. <http://www.jstor.org/stable/2762175>

Susan, Novri (2014). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Prenadamedia Group

Sutarto, A. (2006). *Sekilas Tentang Masyarakat Pedalungan*. Jember: Universitas Jember

Uesugi, Y., Deekeling, A., Ingstedt, A. (2021). A Brief Sketch of Hybrid Peacebuilding. In: Uesugi, Y., Deekeling, A., Umeyama, S.S., McDonald-Colbert, L. (eds) *Operationalisation of Hybrid Peacebuilding in Asia. Security, Development and Human Rights in East Asia*. Palgrave Macmillan, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-67758-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-67758-9_2)

Umam, F. 2017. Praktik Pemerintahan Inklusif di Tengah Pluralitas Keberagaman: Kasus Peringatan Milad Fatimah di Bondowoso dalam Hamdi, A.Z. & Wahid, M (ed.) *Ruang untuk yang Kecil dan Berbeda* (173-244). Yogyakarta: Gading